



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG EKONOMI KREATIF  
KOMISI X DPR RI  
KE KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2021-2022  
13 S.D. 15 DESEMBER 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
3. Undang Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 98 ayat (4) huruf f.
4. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 59 ayat (5) huruf f.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 2 November 2021.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja spesifik bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI berupaya menggali informasi secara langsung di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Cirebon terutama terkait dengan beberapa hal berikut;

1. Bagaimanakah dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan Ekonomi Kreatif dan penguatan potensi SDM pada masa pandemi Covid-19?
2. Sejauh mana pemanfaatan sarana Informasi teknologi (IT) dalam pengembangan Ekonomi Kreatif?
3. Bagaimana peran komunitas masyarakat dalam meningkatkan potensi Ekonomi Kreatif dan pengembangan sumber daya manusia serta apa permasalahannya?
4. Bagaimana saran/masukan terhadap kebijakan pengelolaan Ekonomi Kreatif, agar berdampak signifikan terhadap kemajuan perekonomian masyarakat?

**C. AGENDA KUNJUNGAN KERJA**

Agenda kunjungan kerja spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI mengadakan pertemuan dengan:

- Bupati Cirebon;
- Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon;
- Kepala Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Cirebon;
- Perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
- Perwakilan komunitas/ pelaku industri kreatif di Kabupaten Cirebon

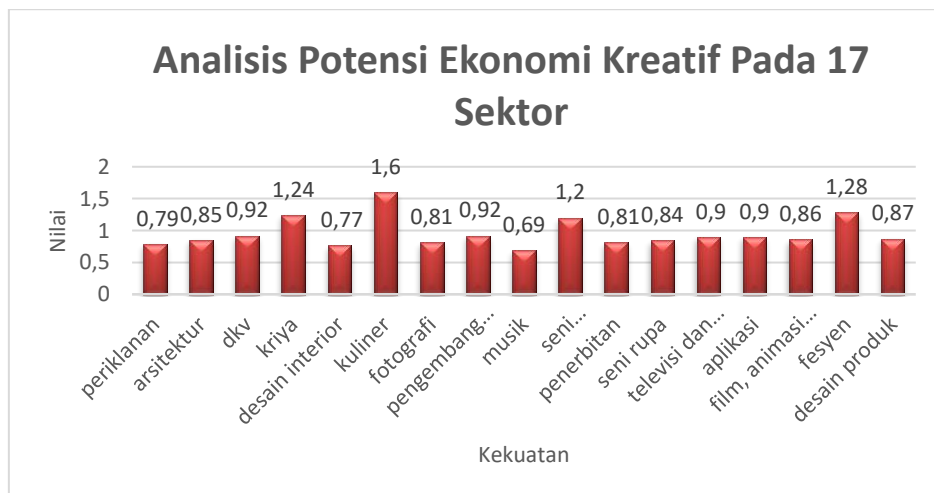
## D. SUSUNAN TIM KUNJUNGAN KERJA

Tim kunjungan kerja spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke kabupaten Cirebon diketuai oleh Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (A-444/F-PKS). Turut serta hadir perwakilan dari Kemenparekraf/Baparekraf RI, yaitu R. Kurleni Ukar selaku Deputy Bidang Kebijakan Strategis dan Hariyanto selaku Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

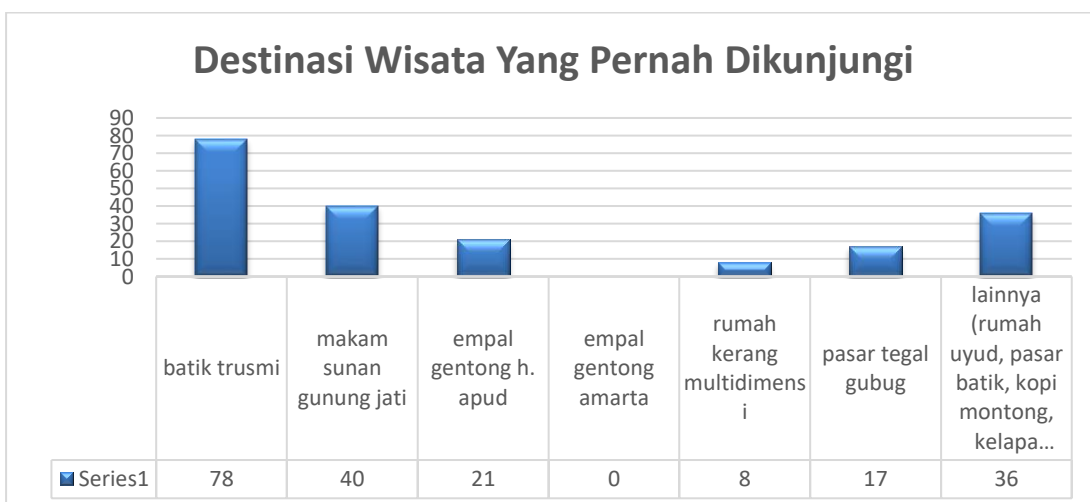
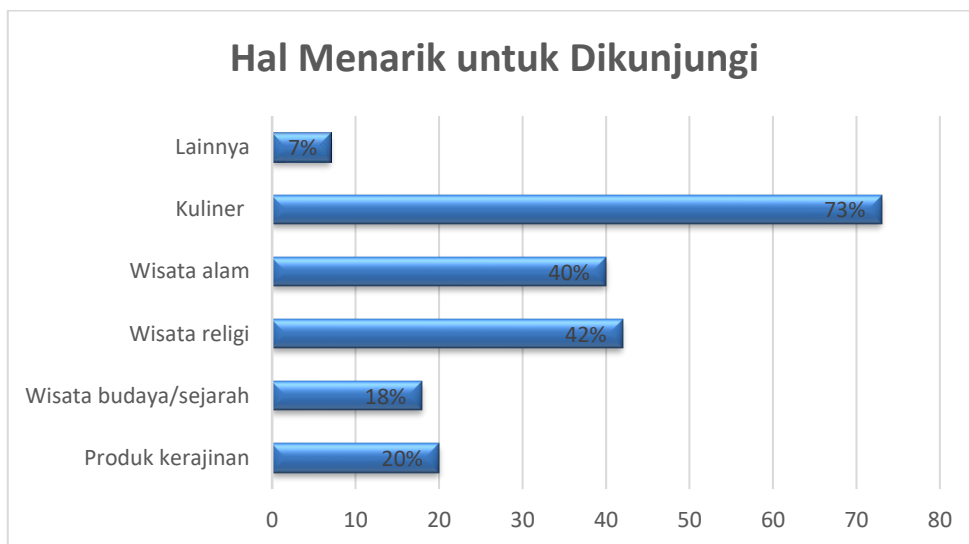
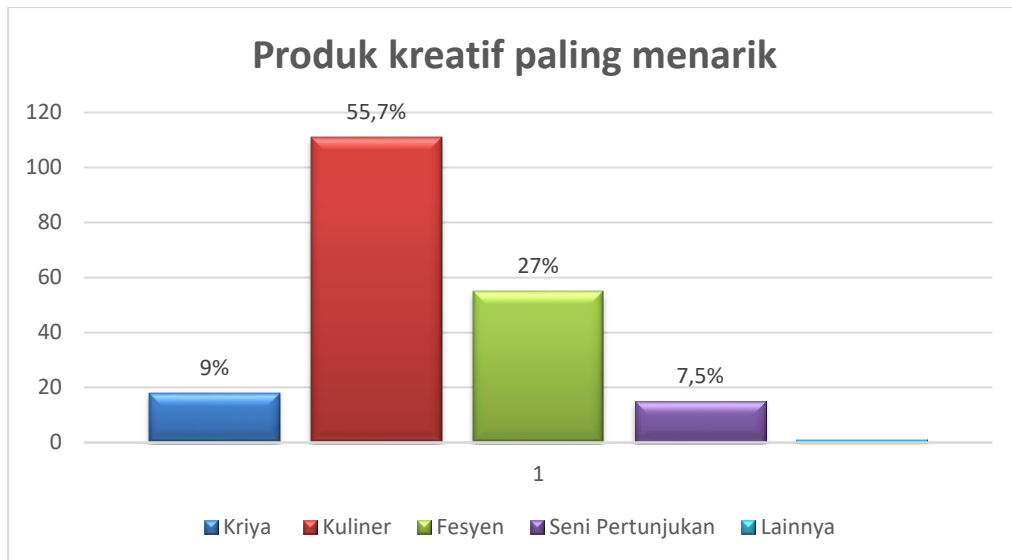
## II. ISI LAPORAN

### A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

1. Pengembangan ekonomi ke depan akan bertumpu pada 3 hal; sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, dukungan digitalisasi ekonomi, dan *networking*.
2. Faktor utama yang dapat dieksplorasi bagi daerah untuk ditawarkan kepada investor adalah potensi sumber daya manusia dan industri kreatif.
3. Ketersediaan infrastruktur skala nasional yang berbasis pada keterhubungan atau aksesibilitas menuju pintu keluar masuk barang dan manusia harus dikembangkan untuk kemandirian ekonomi.
4. Dengan total 40 kecamatan dan 17 sektor Industri Kreatif, serta tersedianya infrastruktur skala nasional yang berbasis pada aksesibilitas menuju pintu keluar masuk barang dan manusia, Kabupaten Cirebon memiliki peluang besar dalam upaya pengembangan industri kreatif.
5. Berdasarkan data pada (Kemenparekraf, 2021), terdapat 17 sub sektor yang termasuk pada ekonomi kreatif, berikut rinciannya: Periklanan, Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Kriya, Desain Interior, Kuliner, Fotografi, Pengembangan Permainan, Musik, Seni Pertunjukan, Penerbitan, Seni Rupa, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video, Fesyen, dan Desain Produk.
6. Dari 17 sub sektor tersebut, terdapat 4 subsektor ekonomi kreatif utama di Kabupaten Cirebon yaitu: Kuliner, Fashion, Kriya, dan seni pertunjukan.



7. Data Persepsi masyarakat terhadap sub sektor ekonomi kreatif di Cirebon



8. Pelaku ekonomi kreatif yang termasuk dalam subsektor ekonomi kreatif Kuliner, Fashion dan Kriya selama ini telah ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

9. Untuk ke depan kita (Disbudpar) sudah melakukan kajian tentang potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon dengan menambahkan subsektor seni pertunjukan dalam Masterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
10. Program dan Kerangka Pengembangan Ekonomi Kabupaten Cirebon.

No	Program	Kerangka	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pasar dan Pemasaran	Pembangunan Rumah Kreatif (Ekraf centre)			√		
		Membuat Website Ekonomi Kreatif	√				
		Melakukan Strategi Digital Marketing dalam Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
		Kerjasama antar daerah Memperluas Networking untuk memperluas pasar	√	√	√	√	√
		Percepatan dan Permudah Prosedur Pembuatan HAKI untuk Produk Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
		Mengadakan Expo Produk Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
		Standarisasi Produk Ekraf untuk masuk Toko Modern/ Supermarket		√	√	√	√
		Kemitraan dengan Perusahaan besar	√	√	√	√	√
		Memperbanyak destinasi wisata	√	√	√	√	√
				Penguatan branding produk ekonomi kreatif	√	√	√

No	Program	Kerangka	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Mengadakan Diklat Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
		Membangun Generasi Baru (Regenerasi) Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif melalui sekolah dan perguruan tinggi	√	√	√	√	√
		Melakukan Penguatan Terhadap Citra Sektor Ekonomi Kreatif ( <i>news Image</i> )	√	√	√	√	√
3.	Kelembagaan	Peningkatan Kualitas Aparatur serta Pelayanan Pada Sektor Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
		Mewujudkan Perda dan Kebijakan Terkait Ekonomi Kreatif		√			
		Penguatan Ekraf melalui bentuk perseorangan/klaster/sentra/komunitas/koperasi	√				
		Memperkuat Dukungan Perbankan Terhadap Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	√				
		Pendirian BLU dana Bergulir			√		
		Fasilitasi pinjaman pelaku ekraf dengan margin rendah	√	√	√	√	√
		Kemitraan permodalan / pembiayaan dengan BUMN/lembaga lainnya		√			

No	Program	Kerangka	2022	2023	2024	2025	2026
4.	Bahan Baku	Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
		Monitoring Harga Bahan Baku Ekonomi Kreatif	√	√	√	√	√
		Mewujudkan komitmen penggunaan Bahan Baku Ekonomi Kreatif yang Ramah Lingkungan	√	√	√	√	√
5.	Infrastruktur Usaha	Industrialiasi Usaha Ekonomi Kreatif		√			
		Pegadaan dan Bantuan Teknologi Tepat Guna		√			
		Pendampingan Penggunaan Teknologi Tepat guna		√	√	√	√
		Bimbingan Teknis /Pelatihan design Produk		√	√	√	√
		Bimbingan teknis packing dan Pakcaging		√	√	√	√
		Pendirian Rumah kemasan		√			

11. Kekuatan dan peluang Ekonomi Kreatif di Cirebon
  - Peningkatan referensi pengembangan ekonomi kreatif.
  - Penguatan ketersediaan produk.
  - Penguatan jejaring usaha ekonomi kreatif yang melibatkan pemerintah, akademisi, asosiasi, pelaku usaha.
  - Pemberdayaan sejarah, budaya dan tradisi masyarakat
  - Penyusunan kebijakan perlindungan sejarah, budaya dan tradisi masyarakat.
  - Memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi kepada pelaku usaha kreatif yang berprestasi.
  - Memberikan penghargaan kepada pelaku usaha kreatif yang berprestasi.
  - Pengadaan kebijakan insentif pajak pada produk lokal.
  - Kemudahan perijinan untuk kesenian dan tradisi lokal.
  
12. Kelemahan dan peluang Ekonomi Kreatif di Cirebon
  - Pengadaan pelatihan dan pendidikan berbasis pemerintah.
  - Pengadaan pelatihan dan pendidikan berbasis komunitas.
  - Pengadaan pelatihan dan pendidikan berbasis akademisi.
  - Penguatan teknologi dalam pementasan.
  - Penguatan akses permodalan/ pembiayaan.
  - Mengintensifkan bantuan modal usaha.
  - Fasilitasi modernisasi teknologi.
  - Pengadaan teknologi tepat guna.
  - Pengadaan website ekraf.
  - Pengadaan sertifikasi produk.
  - Penguatan badan sertifikasi HaKI.
  - Penguatan pemahaman teknologi produksi.
  
13. Kekuatan dan ancaman Ekonomi Kreatif di Cirebon
  - Memperbanyak ruang diskusi publik yang melibatkan pemerintah, akademisi dan para pelaku usaha ekonomi kreatif.
  - Pengadaan standarisasi kompetensi pelaku usaha kreatif.
  - Mengupayakan pemanfaatan aplikasi *opensource*.
  - Penyelenggaraan expo yang dikelola secara baik dan berkesinambungan.
  - Pengadaan kebijakan perlindungan budaya.
  - Peningkatan tata kelola dan manajemen usaha.
  - Penguatan promosi melalui berbagai media.
  - Kolaborasi antar pelaku seni.
  
14. Kelemahan dan ancaman
  - Penguatan iklim usaha kreatif kompetitif.
  - Pengembangan diversifikasi produk.
  - Penguatan citra produk ekonomi kreatif.
  - Pengadaan tim bantuan teknis ekonomi kreatif.
  - Revitalisasi bahan baku.
  - Mendorong pengembangan referensi inovasi produk.
  - Mendorong partisipasi akademisi untuk melakukan riset pengembangan produk ekonomi kreatif.

- Mendorong kuantitas dan kualitas pentas.
- Meningkatkan perlindungan bagi pelaku usaha kreatif.
- Mempermudah proses HaKI.

## **B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN**

1. Data Penerima Bansos Kabupaten Cirebon yang bekerjasama dengan provinsi dan pusat yaitu sebanyak 1.357 orang terdiri dari :
  - Pelaku Hotel dan Restoran
  - Pelaku Seni dan Budaya
  - Pelaku Travel
  - Pelaku Ekonomi Kreatif
2. Produk Cirebon yang Dikenal Konsumen
  - Empal Gentong
  - Tahu Gejrot
  - Terasi
  - Kerupuk Udang
  - Siwang (Terasi Bawang)
  - Kerupuk Kentang
  - Nasi Lengko
  - Docang
  - Tahu Petis
  - Batik Mega Mendung
  - Batik Ciwaringin
  - Kursi Rotan
  - Tari Topeng
  - Sintren
3. Produk ekonomi kreatif yang ada saat ini masih memiliki karakter produk yang bersifat manual (*handmade*), sehingga jika ada pesanan dalam jumlah besar, maka kesulitan dalam memenuhi produk tersebut.. langkah yg dilakukan adalah melakukan penguatan industrialisasi melalui teknologi tepat guna dan mekanisasi.
4. Wisatawan yang paling banyak datang ke Cirebon adalah wisatawan transit yang hanya ke Cirebon <12 Jam.
5. Wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Cirebon adalah berasal dari Jabodetabek.
6. Sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah (1) Sektor kuliner dengan nilai kekuatan 1,60, (2) Sektor fesyen dengan nilai kekuatan 1,28, (3) Sektor kriya dengan nilai kekuatan 1,24 dan diurutkan ke (4) seni pertunjukan dengan nilai kekuatan 1,00.
7. Faktor yang memiliki prioritas paling pertama yang harus diprioritaskan adalah; (1) Sumber daya manusia (SDM) (2) Pasar dan pemasaran dan yang ke (3) Infrastruktur.
8. Pada sub-faktor berdasarkan, urutan proritasnya adalah (1) kreatifitas pelaku usaha , (2) penyediaan alat dan mesin (3) kestabilan harga bahan baku.
9. Faktor kelembagaan, SDM, pasar dan pemasaran, infrastruktur dan permodalan memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan pengembangan usaha ekonomi kreatif. Sementara bahan baku tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif.

10. Hal yang paling dominan berpengaruh terhadap pengembangan usaha ekonomi kreatif yaitu pasar dan pemasaran.

### **C. PEMBAHASAN**

Selama kunjungan spesifik bidang Ekonomi Kreatif, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemenparekraf/Baparekraf RI, antara lain;

1. Pentingnya melakukan inisiasi paket wisata lengkap dalam satu lokasi untuk melayani wisatawan transit.
2. Perlunya Pemda membangun wisata budaya dan tradisional yang menarik dan kekinian, terutama untuk melayani wisatawan perkotaan. (Jabodetabek dan daerah perkotaan lainnya).
3. Peningkatan kualitas dan kapasitas produk, pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan fasilitasi akses teknologi tepat guna sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemampuan pelaku ekonomi kreatif.
4. Pangsa pasar dapat diraih dengan upaya penguatan jejaring pasar, promosi dan branding serta pendirian pusat informasi ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif juga perlu diberi kemasan yang lebih baik agar menarik pasar. Penguatan jejaring dengan toko modern/super market, termasuk Indomart dan alfamart tentunya harus selalu dibarengi dengan peningkatan kualitas produk dengan cara memberikan kurasi produk.
5. Pengembangan terhadap Ekraf juga dapat dengan memberikan fasilitasi melalui penguatan legalitasnya, misalnya kemudahan perijinan, PIRT, HKI, Sertifikat Halal dan bentuk legalitas lainnya.

Pengembangan usaha Ekraf melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, berupa Pelatihan, magang, pendampingan, tata kelola usaha serta kompetensi produksi.

### **D. MASUKAN DAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN**

1. Penguatan produk baik dari kualitas, desain, packaging hingga pemasaran melalui dinas perindustrian dan perdagangan (contoh dalam kuliner dilakukan perbaikan kualitas makanan oleh ahli yg berkompeten). fasilitasi legalitas terkait sertifikat halal dan PIRT produk Ekraf.
2. Pada masa *new normal*, pemerintah mendorong pelaku Ekraf untuk memasarkan produknya ke luar daerah yang potensial secara market (Jogja, Jakarta, Bandung dan Batam).
3. Produk ekonomi kreatif yang ada saat ini masih memiliki karakter produk yang bersifat manual (*handmade*), sehingga jika ada pesanan dalam jumlah besar, maka kesulitan dalam memenuhi produk tersebut.. langkah yg dilakukan adalah melakukan penguatan industrialisasi melalui teknologi tepat guna dan mekanisasi
4. Belum dilakukan sosialisasi terkait UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif karena secara nomenklatur dinas yang menangani Ekonomi Kreatif baru dibentuk pada bulan Oktober tahun 2021 kemarin.
5. pelaku ekonomi kreatif yang termasuk dalam subsektor ekonomi kreatif kuliner, fashion dan kriya selama ini telah ditangani oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

6. Disbudpar sudah melakukan kajian tentang potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Cirebon dengan menambahkan subsektor seni pertunjukan dalam Masterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Rekomendasinya yaitu penguatan kreatifitas bagi pelaku ekraf dan mengindustrialisasi produk Ekraf dan memasarkan produk secara konsisten.
8. Mengapresiasi masuknya Bekraf ke dalam Kemenparekraf, sehingga kita di daerah dapat memfasilitasi dan mengintervensi para pelaku ekonomi kreatif melalui program dan kegiatan.
9. Terdapat 4 subsektor ekonomi kreatif utama di kabupaten Cirebon yaitu: kuliner, fashion, kriya, dan seni pertunjukan.
10. Perlunya penguatan produk baik dari kualitas, desain, packaging hingga pemasaran oleh ahli yg berkompeten. Juga perlunya fasilitasi legalitas terkait sertifikat halal dan PIRT produk Ekraf.
11. Mendorong pelaku Ekraf Cirebon untuk memasarkan produknya ke luar daerah yang potensial secara market. Hal lain yang tak kalah penting adalah penguatan industrialisasi melalui teknologi tepat guna dan mekanisasi
12. Pentingnya penguatan kreatifitas bagi pelaku Ekraf dan mengindustrialisasi produk Ekraf dan memasarkan produk secara konsisten.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan yang dilakukan dengan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif dan Komunitas Ekraf di Kabupaten Cirebon, Tim kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon telah membentuk dinas tersendiri untuk menaungi dan mengembangkan aktivitas ekonomi kreatif, dibawah Dinas kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
2. Dibutuhkannya upaya penguatan keilmuan bagi pelaku Ekraf dan pengembangan produk Ekraf dan memasarkan produk secara konsisten.
3. Belum ada sosialisasi terkait UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif di kabupaten Cirebon sehingga pemahaman utuh terkait potensi Ekraf belum massif.
4. Dengan potensi budaya pertunjukan yang ada, pemerintah kabupaten Cirebon menambahkan subsektor seni pertunjukan dalam masterplan pengembangan Ekonomi Kreatif.
5. Kelangkaan bahan baku produk seperti rotan, dan mahalnya anggaran untuk pengangkutan produk ekspor (kapal kontainer) menyulitkan ekspansi usaha.
6. perlunya penguatan identitas produk lokal, baik dari kualitas, desain, *packaging* hingga pemasaran oleh ahli yg berkompeten.
7. perlunya fasilitasi bagi pelaku Ekraf, terkait legalitas usaha, sertifikasi halal dan PIRT berbagai produk Ekraf.
8. Untuk memperbesar hasil produksi, diperlukan upaya penguatan industri produk Ekraf melalui penerapan teknologi tepat guna.



#### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L lain terkait proteksi/perlindungan hak kekayaan intelektual dan pemasaran produk kreatif lokal
2. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memfasilitasi upaya pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten Cirebon terutama pada subsektor unggulan, yaitu; kuliner, fashion, kriya, dan seni pertunjukan.
3. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI memfasilitasi revitalisasi ruang kreatif dan pertunjukan sebagai tempat untuk mempromosikan produk kreatif dan gelaran budaya khas Cirebon.

#### **V. PENUTUP**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemangku bidang Ekraf dan komunitas Ekraf kabupaten Cirebon dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke kabupaten Cirebon, agar dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 16 Desember 2021

**Ketua Tim,**

Ttd.

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.**

A-444